**LAMPIRAN I**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON**

**PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD**

**SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON**

**IDENTITAS TERMOHON**

1. **DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**
	1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD.*

* 1. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:*

1. *Partai Politik peserta pemilihan umum dan nomor urut berdasarkan Keputusan Termohon; dan/atau*
2. *Calon anggota DPR dan DPRD dan nomor urut berdasarkan Keputusan Termohon.*
	1. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018,* *yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam* *sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional.*

*(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).*

1. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

**PROVINSI...**

1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.*

1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR/DPRD) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.*

1. **AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara secara nasional menurut Termohon dan Pemohon dalam tabel pada seluruh DAPIL secara lengkap yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.*

1. **PETITUM**

*Dalam Eksepsi*

*Menerima eksepsi Termohon;*

*Dalam Pokok Permohonan*

* + - 1. *Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
			2. *Menyatakan Keputusan KPU… tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah benar.*
			3. *Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaa DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta perolehan suara untuk terpenuhinya ambang batas penentuan perolehan kursi anggota DPR;*

*- Kop surat Komisi Pemilihan Umum -*

Jakarta, ....... Mei 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-... /PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik... */calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu*)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

 Nama : ..................................................................................

 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

 Alamat Kantor : ..................................................................................

 ..................................................................................

 nomor telepon kantor...............................................

 email ........................................................................

 NIK : ................................................................. *(sesuai KTP)*

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor… memberi kuasa kepada:

1) …,

2) …,

3) *dst.*

kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor… yang beralamat di… nomor telepon/HP… *email*: … NIK/Kartu advokat... baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai............................................................................. **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor… yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

1. **DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa...,
2. bahwa...,
3. *dst.*
4. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa...,
2. bahwa...,
3. *dst*.
4. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
5. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
6. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
8. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS *(OBSCUUR LIBEL)***

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa...,
2. bahwa...,
3. *dst*.
4. *Eksepsi lainnya (jika ada)*
5. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil-dalli Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan serta perolehan suara yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, menurut Termohon sebagai berikut.

* 1. **PROVINSI...**
		1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

**2.1.1.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

* + - 1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebesar/sebanyak*… *suara adalah tidak benar (bukti T-…,)*
			2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…,)*
			3. *dst.*

**2.1.1.2. DAPIL..dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]*

* + 1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

* + - 1. **DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPR** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…)*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…)*
3. *dst.*
	* + 1. **DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]*
		1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

* + - 1. **DAPIL ...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…)*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…)*
3. *dst.*
	* + 1. **DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]*
		1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

**2.2.4.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Provinsi** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…)*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…)*
3. *dst.*

**2.2.4.2. DAPIL..., *dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi)]*

* + 1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

**2.1.5.1. KABUPATEN/KOTA...**

* + - * 1. **DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…)*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…)*
3. *dst.*
	* + - 1. **DAPIL... *dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*
			1. **KABUPATEN/KOTA...**
				1. **DAPIL...**
				2. **DAPIL...*dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*
		1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

**2.1.6.1. KABUPATEN...**

* + - * 1. **DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…)*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…)*
3. *dst.*
	* + - 1. **DAPIL..., *dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]*
			1. **KABUPATEN/KOTA...**
				1. **DAPIL...**

**2.1.6.2.2 DAPIL..., *dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]*

* 1. **PROVINSI..., *dst*.** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan DPRD)]*
	2. **AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA**

*Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara secara nasional menurut Termohon dan Pemohon dalam tabel di bawah ini pada seluruh DAPIL secara lengkap yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, seperti contoh sebagai berikut.*

**Tabel .... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) SECARA NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA PER DAPIL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Provinsi** | **Daerah Pemilihan** | **Perolehan Suara**  |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Aceh | Aceh I | ... | ... |
| Aceh II | ... | ... |
| 2. | dst. |  | ... | ... |
|  | ... | ... |
|  | ... | ... |
| 34. | Papua Barat | Papua Barat | ... | ... |
| Jumlah | ... | ... |
|  % | ... | ... |

*Bahwa perbedaan perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…)*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di ... sebesar/sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-…)*
3. *dst.*

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal…, Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan serta perolehan suara untuk terpenuhinya ambang batas penentuan perolehan kursi anggota DPR yang benar adalah sebagai berikut:
	1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI...**
		1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas, seperti contoh berikut ini:*

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara**  |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.*  | ... |

**DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon (calon anggota DPR) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (calon anggota DPR) sesuai dengan posita permohonan di atas, seperti contoh berikut ini:*

**DAPIL ...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.**  | **Nama Calon Anggota DPR** | **Perolehan Suara**  |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas, seperti contoh berikut ini:*

 **DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara**  |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.*  | ... |

**DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi) sesuai dengan posita permohonan di atas, seperti contoh berikut ini:*

 **DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.**  | **Nama Calon Anggota DPRD Provinsi** | **Perolehan Suara**  |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL…, dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas, seperti contoh berikut ini:*

**KABUPATEN/KOTA...**

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara**  |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.*  | ... |

**KABUPATEN/KOTA..., dst** *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

 *Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) sesuai dengan posita permohonan di atas, seperti contoh berikut ini:*

**KABUPATEN/KOTA…**

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota** | **Perolehan Suara**  |
|
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL…, dst.** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].*

**KABUPATEN/KOTA..., dst.**

**DAPIL..., dst.** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].*

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.**
	2. **AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA**

*Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) pada seluruh DAPIL secara lengkap yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sesuai dengan posita permohonan di atas, seperti contoh berikut ini:*

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) SECARA NASIONAL BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA PER DAPIL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Provinsi** | **Daerah Pemilihan** | **Perolehan Suara Pemohon** |
|
| 1. |  Aceh  | Dapil I | ... |
| Dapil II | ... |
| 2. | dst. |  | ... |
|  | ... |
|  | ... |
| 34. | Papua Barat | Papua Barat | ... |
| Jumlah | ... |
| % | ≥ 4 % |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**Termohon/Kuasa Hukum Termohon\***

* + - 1. Nama (tanda tangan)
			2. Nama (tanda tangan)
			3. dst.

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum